

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Konstruksi Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri Guna Mengoptimalkan Pengelolaan Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Adil dan Makmur. Keberadaan wakaf sebagai ibadah harta (kekayaan) yang dapat memberikan kontribusi terhadap aktivitas perekonomian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjelaskan secara spesifik tentang keberadaan lembaga wakaf bersifat mandiri sebagai suatu entitas badan hukum tersendiri. Ketidak mandirian lembaga wakaf tentu akan memiliki implikasi negatif terhadap praktek perwakafan. Fokus kajian penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis: Kedudukan dan Fungsi Realitas Nazhir menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf guna mewujudkan Negara Adil dan Makmur, Lembaga Wakaf di Indonesia tidak di bentuk sebagai Badan Hukum Mandiri sebagai upaya mewujudkan Negara Adil dan Makmur, Konstruksi Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri Guna Mewujudkan Negara Adil dan Makmur.

Paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu tidak hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dengan melihat realitas yang ada. Pendekatan dalam penelitian ini bersifat empiris atau sosiologis. Metode penelitian hukum empiris atau sosiologis ini bertitik tolak dari sumber data primer dan data skunder, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi melalui penelusuran kepustakaan, data primer dan data skunder yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, Teori Sistem Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedudukan dan fungsi realitas nazhir, belum menunjukkan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian nazhir itu sendiri, Hal ini mengingat aturan terkait nazhir, baik tentang kedudukan, peran dan fungsinya belum diatur secara jelas dan kongkrit. Problematika yang dihadapi lembaga wakaf, termasuk BWI pada saat ini adalah ketidak mampuan untuk bergerak secara dinamis, karena seluruh aktivitas Lembaga wakaf yang ada tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan dari ketentuan wakaf itu sendiri, disamping ketidak jelasn aturan, lembaga wakaf kuga tidak bisa terlepas dari bayangan pemerintah. Lembaga wakaf yang ada, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, tidak menjelaskan secara spesifik konotasi lembaga yang dilekatkan pada wakaf itu sendiri yang di dalamnya meliputi wakif, Nazhir baik perseorangan, organisasi dan badan hukum. Sehingga urgensi rekonstruksi untuk mengkonstruksi kembali terhadap Lembaga Wakaf, perlu dilakukan dengan cara menjadikannya benar-benar sebagai Badan Hukum Mandiri.

Kata Kunci: Konstruksi, Lembaga, Wakaf, Badan Hukum, Mandiri, Adil dan Makmur

ABSTRACT

This research *studies about* the construction of waqf institutions as self-sufficient corporation in order to optimize the management of waqf assets as an effort to create a fair and prosperous country. The existence of waqf as a worship of wealth (property) that can contribute to economic activities. It can improve the welfare of society, reduce poverty. The existing laws and regulations do not describe or specify the existence of an independent waqf institution as a separate legal entity. The independence of the waqf institution will certainly have negative implications in practicing of waqf. The focus of this research study is: to determine and analyze: The Position and Function of Nazhir's Reality according to Law no. 41 of 2004 concerning waqf in order to create a Fair and Prosperous Country, the Waqf Institution in Indonesia is not established as an Independent Legal Entity as an effort to create a Just and Prosperous State, Construction of Waqf Institutions as Independent Legal Entities to Create a Just and Prosperous State.

Constructivism paradigm, is a paradigm which views that legal science is not only dealing with statutory regulations, but also by looking at the existing reality. The approach in this research is empirical or sociological. This empirical or sociological legal research method started from primary data sources and secondary data, with data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation study through literature search, primary data and secondary data obtained will be analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques. The theory used in this research is the theory of justice, the theory of legal systems, the theory of legal benefits.

Based on the research results, the position and function of Nazhir's reality have not shown what is meant in the meaning of Nazhir itself. This is because the rules related to Nazhir, both regarding the position, role and function have not been clearly and concretely regulated. The problem faced by waqf institutions, including BWI at this time is the inability to move dynamically, because all activities of the existing waqf institutions cannot run well according to the rules of the provisions of the waqf itself, aside from the lack of clarity in regulations, the waqf institution cannot be separated from the government. The existing waqf institutions, as regulated in Law no. 41 of 2004, does not specify the connotation of the institution attached to the waqf itself which includes wakif, Nazhir, both individuals, organizations and legal entities. So that the urgency of reconstruction to reconstruct the Waqf Institution, needs to be done by making it truly an independent legal entity.

Keyword: *Construction, Institution, Waqf, Legal Entity, Independent, Fair and Prosperous*